

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAN PENYAJIAN ASET TETAP DALAM LAPORAN KEUANGAN

Roro Siswati
rorosiswati@gmail.com
Iksan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the use of application of asset management system in the management of State Property in the Tenth November Institute of Technology (ITS). The research method has been done by using qualitative descriptive. The data collection has been done by using technique of observation, interview, and documentation. The preparation and the reporting of state property has been carried out by using an application that is made by ITS i.e. ITS Asset Management Information System (SIMAS). The ITS SIMAS is an application which can run the data and the information management that is related to the physical asset particularly in the capital expenditure and has integrated to financial application, approval application, and application SIMAK BMN. The mechanism of presentation and preparation of the reporting of state property the public service agency of ITS has been conformed with the Government Regulation and has been implemented completely the guideline of Accounting and Financial and The Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Keywords: Information System, State Property Public Service Agency, Tenth November Institute Of Technology.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi sistem manajemen aset dalam pengelolaan barang milik negara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyusunan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) telah menggunakan sistem aplikasi yang dibuat oleh ITS yaitu sistem informasi manajemen aset (SIMAS) ITS. SIMAS ITS berupa suatu aplikasi yang dapat melakukan pengelolaan data dan informasi terkait aset fisik yang dimiliki khususnya dalam belanja modal dan sudah terintegrasi dengan aplikasi keuangan, aplikasi pengesahan dan aplikasi SIMAK BMN. Mekanisme penyusunan dan penyajian laporan barang milik negara ITS sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan menerapkan sepenuhnya Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kata kunci: Sistem Informasi, Barang Milik Negara, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

PENDAHULUAN

Sistem informasi manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam perusahaan. Winarno (2004: 16) menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan, untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer. Pada masa sekarang ini sistem manual sudah diganti dengan sistem komputer. Dengan adanya sistem komputerisasi ini konsep sistem informasi manajemen menjadi kenyataan yaitu segala macam informasi dalam perusahaan harus diolah dengan cepat, teliti dan andal sehingga input dan proses menjadi berorientasi pada output informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam menjalankan proses pencapaian tujuan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai institut pendidikan milik pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) memerlukan informasi manajemen sebagai salah satu peran penting dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, termasuk diantaranya juga adalah laporan Barang Milik Negara (BMN). Penyusunan laporan barang milik negara Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN terdapat Aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang berasal dari pemerintah pusat. Dalam aplikasi SIMAK BMN ada keterbatasannya yaitu tidak adanya batasan yang jelas pada hak akses administrator dan hak user, keamanan database yang kurang memadai, proses verifikasi data aset sulit untuk dilakukan. Dengan adanya permasalahan tersebut Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya merancang suatu program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap ITS (SIMAS ITS) yang berguna dalam pencatatan, rekonsiliasi serta penyusunan laporan barang milik negara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mewujudkan laporan barang milik negara yang akurat dan akuntabel. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset digunakan dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, apakah output yang dihasilkan membantu kuasa pengguna barang untuk menghasilkan laporan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih akurat dan akuntabel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset dalam pengelolaan Barang Milik Negara di ITS, untuk mengetahui output yang dihasilkan dalam membantu kuasa pengguna barang untuk menghasilkan laporan Barang Milik Negara yang lebih akurat dan akuntabel.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Sistem dan Prosedur

Sistem memiliki beberapa definisi menurut beberapa pakar. Menurut O'Brien dan Marakas (2014: 27) menyatakan bahwa sistem merupakan seperangkat komponen yang saling terhubung, dengan sebuah batasan yang jelas, bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam sebuah proses transformasi yang terorganisasi. Menurut Bodnar dan Hopwood (2006: 3) bahwa sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Mulyadi (2001: 5) berpendapat bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin keamanan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem adalah rangkain prosedur yang dibuat untuk melaksanakan aktivitas melalui 3 tahapan utama yang meliputi input, proses dan output dalam rangka mencapai tujuan tertentu organisasi. Sedangkan prosedur dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka utama pembentuk sistem. Diantara keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam pelaksanaan aktivitas suatu organisasi. Sistem dan prosedur ini merupakan implementasi dari aktivitas suatu entitas. Dari suatu sistem dan prosedur suatu entitas diperoleh informasi sebagai suatu data yang terorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan.

Sistem Informasi

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem harus mempunyai tujuan (*goal*) yang jumlahnya bisa satu atau mungkin lebih. Tujuan inilah yang menjadi penggerak motivasi dalam mengarahkan sistem untuk berjalan baik, tanpa tujuan sistem menjadi tidak terarah dan terkendali secara baik. Dalam suatu sistem perlu adanya suatu masukan (*input*) ke dalam sistem selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Melalui tahap proses yang merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Dalam sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam, meringkas data, melakukan perhitungan dan mengurutkan data merupakan beberapa contoh proses.

Hasil dari suatu proses adalah keluaran (*output*) yang merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya. Dalam rangka menjamin sistem berjalan sesuai tujuan perlu mekanisme pengendalian (*control mechanism*) dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses sistem informasi sebagai sistem, merupakan suatu pengumpulan data yang terorganisir beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh dari pada sekedar penyajian. Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud pembuatannya tergantung pada tiga faktor utama yaitu keserasian dan mutu data, pengorganisasian data, dan tata cara penggunaan data. Guna menjamin berjalannya suatu sistem informasi perlu didukung oleh komponen-komponen sebagai berikut: (1) Perangkat keras (*hardware*): mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer. (2) Perangkat lunak (*software*) atau program: sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. (3) Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. (4) Orang: semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi. (5) Basis data (*database*): sekumpulan *table*, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. (6) Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Dalam pengembangan sistem informasi yang berbasis pelaporan tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem informasi itu sendiri. Selanjutnya, dalam pemanfaatan teknologi dalam suatu sistem informasi, sistem pelaporan yang dilakukan secara elektronik perlu memperhatikan sistem pelaporan (*reporting sistem*) yang terkait sistem itu sendiri. Hal ini dikarenakan kelancaran dan mutu data yang akan diolah sangat tergantung dengan kehandalan sistem pelaporan tersebut. Untuk menyusun sistem pelaporan yang ideal diperlukan 6 (enam) prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu: (a) *Timely* (tepat waktu): agar informasi dan data dapat digunakan secara maksimal, sistem pelaporan harus meyakinkan penggunaannya bahwa informasi dan data yang diperlukan dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu. (b) *Accurate* (keakuratan): informasi dan data yang dilaporkan harus bebas dari kesalahan dan manipulasi. (c) *Reasonable* (tingkat kesulitan): pihak penerima laporan (*regulator*) harus mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dihadapi pihak pelapor dalam menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan

kata lain, sistem dan mekanisme pelaporan jangan sampai menyulitkan pihak pelapor sehingga menghasilkan hasil yang kontra produktif. (d) *Relevant* (relevansi): data dan informasi yang disampaikan oleh pelapor dan kemudian diolah oleh penerima laporan harus menghasilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan sebagaimana yang telah ditentukan. (e) *Efficient* (efisien): biaya yang diperlukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi harus proporsional dengan besarnya manfaat dan nilai informasi yang dihasilkan. (f) *Transforming* (dapat diolah): data dan informasi yang diterima harus dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut dan mempermudah user (analisis) untuk melakukan kajian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan banyak sistem pelaporan yang menghasilkan data yang statis, tidak up-to-date, dan tidak dapat diolah kembali.

Sistem Informasi Manajemen

Menurut McLeod dan Schell (2004: 11) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Sedangkan menurut Nugroho (2008: 16) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang mengelola informasi bagi manajemen organisasi.

Menurut Winarno (2004: 2.8) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan, untuk keperluan pengambilan keputusan manajer, terutama manajer madya dan manajer puncak.

Badan Layanan Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Pengertian Badan Layanan Umum adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengguna anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi satuan kerja BLU/BLUD bersangkutan. Uraian pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran pada satuan kerja BLU. Karakteristik Badan Layanan Umum: (1) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. (2) Menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan masyarakat. (3) Tidak bertujuan untuk mencapai laba. (4) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. (5) Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk. (6) Penerimaan baik pendapatan atau sumbangan dapat digunakan secara langsung (7) Pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil (9) BLU bukan subyek pajak.

Tujuan dan Asas BLU

Tujuan dibentuknya BLU adalah seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 68 ayat (1) yaitu: Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Dan terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang berbunyi; BLU bertujuan meningkatkan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Berdasarkan isi-isi pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum mempunyai tujuan, yaitu: (1) Untuk meningkatkan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat; (3) Untuk memberikan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi pemerintah yang terkait.

Asas Badan Layanan Umum diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, sehingga dapat disimpulkan bahwa asas-asas badan layanan umum berdasarkan pasal tersebut adalah: (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk bertujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari Perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi: (1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; (2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak; (3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; (4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah.

Database Management System (DBMS)

Database Management System (DBMS) atau Sistem Manajemen Basis Data adalah sistem yang terdiri dari perangkat lunak yang dapat mengatur penyimpanan data, sehingga memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengolah data secara efisien dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Dalam sistem yang besar, sebuah DBMS memungkinkan pengguna dan perangkat lunak lain untuk menyimpan dan mengambil data dalam cara yang tersyukur. Beberapa fitur yang secara umum ada pada sistem DBMS, yaitu: (1) Keamanan: DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. (2) Independensi: DBMS menjamin independensi antara data dan program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu diubah. (3) Konkrekuensi/data sharing: Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. (4) Integritas: DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. (5) Pemulihan: DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan (error) atau gangguan baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. (6) Kamus/katalog sistem: DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari field-field data yang terkandung dalam basis data. (7) Perangkat produktivitas: DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database, misalnya *report generator query generator* (pembangkit query/pencarian informasi), (pembangkit laporan).

Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data dimana komponen-komponen tersebut, dan asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. DFD dapat digunakan untuk dua hal utama, yaitu untuk membuat dokumentasi dari sistem informasi yang ada, atau untuk menyusun dokumentasi untuk sistem informasi yang baru.

Software

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Software dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu: (1) Perangkat lunak sistem operasi (*operating system software*) (2) Perangkat lunak bahasa (*language software*) (3) Perangkat lunak aplikasi (*application software*)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Maman (2002: 3) penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan gejala sosial. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur untuk kemudian disusun dan dianalisis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari: **(1) Data Primer:** Data primer yaitu data yang dipeoleh langsung dari ITS yang menjadi objek penelitian dan hasil wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu melalui karyawan dan pimpinan ITS yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti diantaranya gambaran dan penjelasan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. **(2) Data Sekunder:** Data sekunder bersumber dari sumber-sumber lain seperti dokumen-dokumen institusi yang meliputi gambaran umum institusi, struktur organisasi, data tentang kebijakan manajemen yang diterapkan, serta data lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (a) Observasi: dilakukan dengan cara mendatangi Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang akan diteliti untuk melihat semua proses yang terjadi sehingga dapat memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. (b) Wawancara: adalah proses tanya jawab penelitian yang berlangsung secara lisan antara satu orang atau lebih dengan bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan dengan pihak terkait yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen aset tetap badan layanan umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk mendapatkan data pendukung yang tertulis. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah: Kabag Akuntansi pada Biro Keuangan dan Sarana Prasarana ITS, Kasubag Pelaporan pada Biro Keuangan dan Sarana Prasarana ITS, Staf Pelaporan pada Biro Keuangan dan Sarana Prasarana yang menangani SIMAS ITS. (c) Dokumentasi: Mengumpulkan data dari ITS yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, laporan-laporan serta catatan yang terdapat di ITS. Dokumen berguna karena dapat memberi latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dan dapat dijadikan bahan *triangulasi* untuk mengecek kesesuaian data.

Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini adalah satuan kerja di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang melakukan pengelolaan barang milik negara yaitu: Tata Usaha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Tata Usaha Fakultas Teknologi Industri (FTI), Tata Usaha Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Tata Usaha Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), Fakultas Teknologi Informatika (FTIF), dan Pasca Sarjana ITS.

Teknik Analisis Data

Desain penelitian adalah logika keterkaitan antara data yang harus dikumpulkan (dan kesimpulan-kesimpulan yang akan dihasilkan) dan pertanyaan awal suatu penelitian. Setiap penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian *eksplorasi*, memainkan peranan penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang variabel sosial (Bungin, 2008: 68). Untuk Studi kasus, ada enam (6) komponen desain penelitian yaitu : Informan Penelitian, cara memperoleh sumber data (informan) dan penentu unit analisis penelitian, metode pengumpulan data dan keabsahan data, metode analisis data, rancangan pembahasan (diskusi) hasil penelitian, rancangan laporan penelitian.

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data-data primer maupun sekunder yang bermanfaat bagi penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengumpulkan data-data perusahaan mengenai sistem informasi akuntansi barang milik negara melalui perancangan database SIMAS ITS

kemudian dilakukan pemahaman terhadap deskripsi hasil penelitian, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi barang milik negara melalui perancangan database SIMAS ITS, melakukan proses implementasi teori-teori yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi barang milik negara melalui perancangan database SIMAS ITS, melakukan interpretasi hasil temuan kemudian menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran pengembangan implementasi hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) ITS

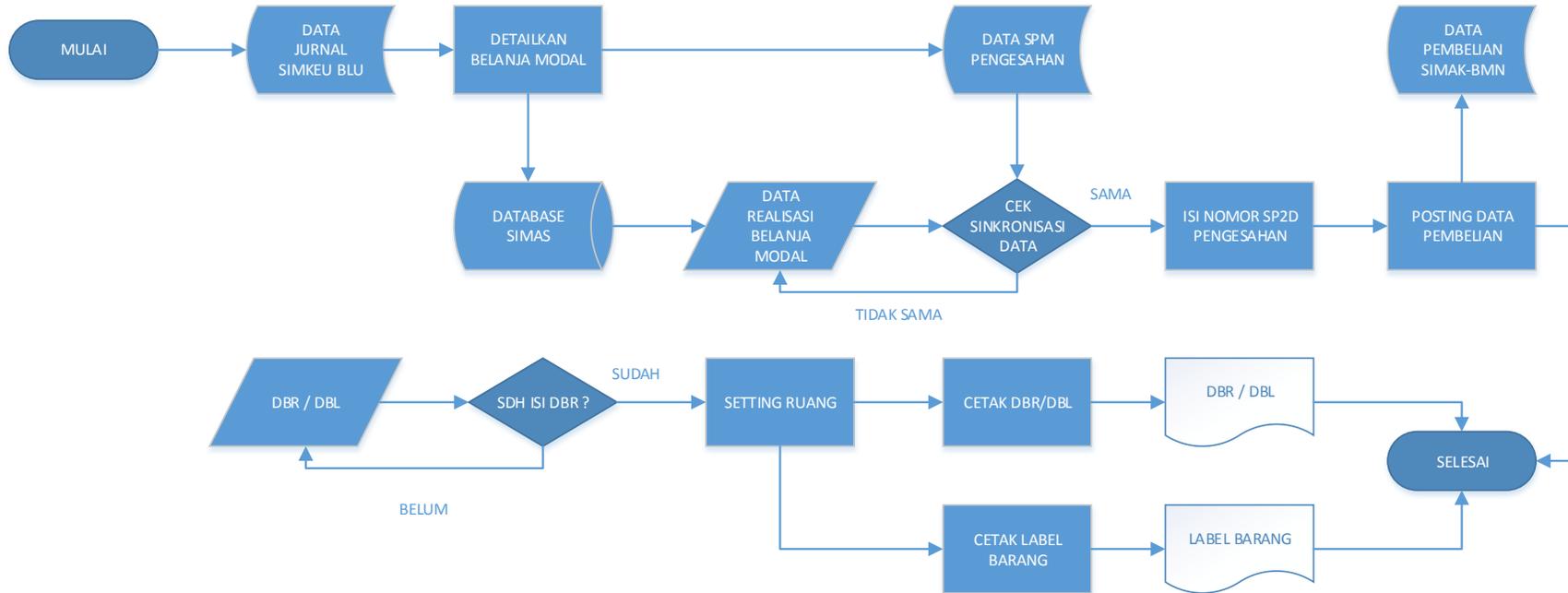
Sistem informasi Manajemen Aset di ITS dirancang agar pengelolaan Barang Milik Negara di ITS secara fisik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif dan efisien karena dapat melakukan pengelolaan barang milik negara secara obyektif dan informasi yang tersimpan dapat disampaikan secara tepat waktu dan akurat. Data dan informasi yang dihasilkan pun dapat dikatakan terpercaya karena informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan serta diuji kebenarannya.

Dengan penggunaan aplikasi SIMAS ITS maka diharapkan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di ITS dapat dilaksanakan lebih optimal. Sistem Informasi Manajemen Aset ini berupa suatu aplikasi yang dapat melakukan pengelolaan data dan informasi terkait aset fisik yang dimiliki khususnya dalam hal belanja modal. Sistem Informasi Manajemen Aset ITS menggunakan teknologi desktop client server, aplikasi dikembangkan menggunakan MS. Visual Basic Dot Net 2010 dengan database menggunakan MS. SQL Server 2000. Pemilihan platform berbasis desktop berdasarkan aplikasi existing SimakBMN yang berbasis desktop dan pemilihan database mengikuti standart database yang telah digunakan aplikasi keuangan.

Keunggulan platform ini adalah Menggunakan teknologi dot net terbaru dari Microsoft dan di support untuk semua versi windows, support dengan aplikasi pemerintahan yang juga berbasis desktop (SPM, SAKPA, SimakBMN) dan mendukung topologi client server, dimana database cukup di install di satu server dan aplikasi dapat di instalasi di banyak PC serta platform desktop tidak membebani kinerja server, sehingga tidak membutuhkan spesifikasi server yang terlalu tinggi. Server dikhususkan untuk pengolahan database. Disamping kelebihan diatas teknologi ini juga memiliki kelemahan, yaitu untuk menjalankan diperlukan instalasi di PC dengan OS Windows dan setiap ada update harus dilakukan proses instalasi manual.

Aplikasi Sistem Manajemen Aset ITS didesain untuk dapat berkoordinasi dan sinkronisasi dengan aplikasi lain meliputi: Aplikasi Keuangan yang digunakan untuk menarik data transaksi jurnal aset yang akan di detailkan dengan uraian barang di aset. Aplikasi Pengesahan yang digunakan untuk menarik data SPM pengesahan belanja modal dan di mappingkan dengan data aset berdasarkan jurnal aset yang sudah di sahkan. Setelah masuk ke aplikasi aset akan di detailkan. Aplikasi SimakBMN yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi data aset sehingga tidak diperlukan dua kali *entri* data. Data aset dapat langsung dikirim ke database SimakBMN. Aplikasi SIMAS dikembangkan dengan konsep modular dan masing masing memiliki hak akses yang dapat disesuaikan dengan fungsi dan jabatan user. Kewenangan tertinggi di modul administrator yang diperuntukkan di unit pusat pengelola aset. Modul ini ditujukan untuk pengaturan konfigurasi di modul dibawahnya. Modul kedua adalah modul operational aset di unit unit, dengan kewenangan yang dibatasi secara permanent dari aplikasi. Melalui sistem informasi manajemen aset ini maka diharapkan permasalahan mengenai kinerja barang milik negara secara fisik yang dimiliki oleh ITS dapat teratasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan pelaporan Barang Milik Negara yang lebih Akurat dan Akuntabel.

Flowchart SIMAS ITS



Gambar 1
Flowchart SIMAS ITS

Sumber: Internal ITS (2015)

Keterangan: Secara periodik data jurnal aset (akun 135xxx) yang telah divalidasi bagian keuangan akan ditarik ke aplikasi aset. Data yang sudah ditarik secara otomatis dikunci dan tidak dapat dilakukan perubahan, karena data ini akan menjadi dasar pengisian data pembelian aset di aplikasi SIMAS. Setelah jurnal aset dari keuangan ditarik ke aplikasi SIMAS, dilakukan detail barang yang disertai dengan informasi: (a) Tanggal perolehan dan tanggal pembukuan, secara otomatis mengambil tanggal dari jurnal keuangan. (b) Harga satuan dan jumlah barang, total nilai di kunci sesuai dengan nilai di jurnal keuangan. (c) Asal perolehan. (d) Nomor bukti. (e) Identitas merk barang. (f) Keterangan.

Jurnal aset keuangan yang telah diposting secara periodik akan disahkan melalui aplikasi SPM Pengesahan untuk diakui sebagai aktiva (aset) di neraca. SPM ini menjadi referensi aset sekaligus sebagai acuan nilai aset di neraca SAP. Data SPM belanja modal ini akan ditarik oleh aplikasi SIMAS dan dilakukan sinkronisasi dengan data jurnal keuangan, sehingga setiap perolehan barang (aset) secara otomatis memiliki nomor referensi SPM sesuai dengan data pengesahan.

Proses migrasi yang berdasarkan periode SP2D sesuai realisasi pengesahan belanja modal. Berikut ini uraian proses : (a) Validasi data aset per SP2D: Sebelum dilakukan migrasi rincian data belanja modal ke simak, dilakukan prosedur validasi data. Validasi berdasarkan SP2D, dengan membandingkan nilai SP2D dengan nilai transaksi dan validasi cek kesesuaian data barang. Data yang sudah tervalidasi selanjutnya akan dilakukan proses postingvalidasi data. Validasi berdasarkan SP2D, dengan membandingkan nilai SP2D dengan nilai transaksi dan validasi cek kesesuaian data barang. Data yang sudah tervalidasi selanjutnya akan dilakukan proses posting. (b) Posting Aset Per SP2D: Proses migrasi pada dengan melakukan posting transaksi per SP2D yang sudah di validasi. *Flag* posting melekat di masing masing SP2D sehingga dapat dihindari terjadinya *redundance* data. Proses posting ini sedikit berbeda dengan proses migrasi, dimana posting akan melakukan transfer data di SimakBMN dan dilanjutkan ke Database Aset PNBPN. Sehingga data aset pnbpn akan memiliki *history* yang lengkap, meliputi asal data di keuangan dan posisi data di SimakBMN.

Data aset yang sudah diposting dapat di migrasikan ke simak internal di masing masing unit. Unit yang berwenang melakukan input data diatas sesuai dengan unit yang ada masing masing jurnal keuangan. Khusus untuk unit pusat berwenang mendistribusikan pembelian barang di beberapa unit. Hasil entri aset per unit tidak sekedar untuk kebutuhan migrasi, tetapi di kelola secara khusus untuk menjadi modul aset unit, sehingga data aset di aplikasi aset merupakan representasi dari data simakBmn yang berasal dari dana PNBPN. Pada aplikasi simakBmn tidak membedakan sumberdana, sehingga aplikasi aset ini dirancang untuk lebih rinci menyangkut histori transaksi yang meliputi sumberdana, asal jurnal, periode pengesahan dan asal SPM. Unit diberikan akses ke modul ini untuk kebutuhan pengelolaan internal dan *reporting* serta konfirmasi data jika terjadi perubahan kondisi aset (mutasi, rusak) dan akan ditindaklanjuti untuk perubahan data di simakBmn. Sebaran / peletakan dan distribusi aset menjadi wewenang internal unit untuk mengelola, termasuk pemberian label / nomor. Modul ini dengan mengikuti prosedur yang berlaku di SimakBMN, sehingga data DBR/DBL di simak dapat di migrasikan dari data ini.

Untuk menghindari kesalahan detail barang dengan data jurnal keuangan, dibuatkan modul mapping kode aset dengan kode akun aset SAK, sehingga setiap akun aset hanya dapat diisi kode aset yang bersesuaian. Pada struktur tabel barang juga dilakukan redesain untuk menghindari terjadinya duplikasi di simakBmn ketika di lakukan migrasi berulang.

Laporan BMN SIMAS ITS

Salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum

(BLU) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah salah satu instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai instansi PK-BLU diharuskan untuk membangun dan mengembangkan sistem akuntansi BLU berupa sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap dan sistem akuntansi biaya serta sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial. Biro Keuangan dan Sarana Prasarana merupakan biro yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Guna menunjang tugas dan fungsi di bidang keuangan dan sarana prasarana, Biro Keuangan dan Sarana Prasarana telah membangun dan mengembangkan sistem dan aplikasi antara lain SIM Biaya Pendidikan, SIM Pencairan UMK, SIM Akuntansi Keuangan BLU, SIM Aset ITS, SIM honorarium dan SIM Penerimaan AMU. Penerapan sistem informasi manajemen BLU tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Karena itu informasi dan data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara ini telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I (LBKP) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Laporan Barang Milik Negara Institut Teknologi Sepuluh Nopember selaku UAKPB telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pengelolaan BMN pada Insitut Teknologi Sepuluh Nopember secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) ITS telah membantu kuasa pengguna barang dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara yang lebih Akurat dan Akuntabel. Hal ini terbukti dengan kemampuan SIMAS dalam menyelesaikan masalah yang ada yaitu tidak adanya batasan yang jelas pada hak akses administrator dan hak user, keamanan database yang kurang memadai, proses verifikasi data aset sulit untuk dilakukan, dan SIMAS ITS telah digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara sejak semester II Tahun Anggaran 2012 sampai saat ini yaitu semester 1 Tahun Anggaran 2015.

Penyajian BMN Dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi tujuan umum (*general purpose*), yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan berfungsi sebagai pertanggungjawaban periodik atas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada Satuan Kerja BLU ITS dalam mencapai tujuan dan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayai kepada BLU ITS serta ketaatannya terhadap peraturan perundangan serta sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan BLU ITS sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, liabilitas dan ekuitas BLU ITS untuk kepentingan stakeholder.

Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas BLU ITS. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan konsisi lain sesuai dengan kriteria standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan, BLU ITS sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Pasal 26 ayat 2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Dan sesuai dengan (Pasal 27 ayat 6 dan 7) Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangankementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BLU ITS menerapkan sepenuhnya Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 45 (Revisi 2011) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan peraturan perundangan-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yaitu: Definisi : (a) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau proses penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu tahun. (b) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dari suatu aset selama umur manfaatnya. (c) Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset dikurangi nilai sisanya. (d) Umur manfaat (*useful life*) adalah suatu periode dimana aset diharapkan dapat digunakan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut. (e) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui. (f) Nilai sisa aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh BLU dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. (g) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*). (h) Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. (i) Kerugian penurunan nilai (*impairment loss*) adalah selisih negatif antara jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut.

Pengelompokan Aset Tetap: Aset tetap BLU ITS dikelompokkan sebagai berikut: Tanah, Gedung dan bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, irigasi, dan jaringan dan Aset tetap

lainnya. Tanah dan bangunan adalah aset tetap yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah meskipun aset tersebut diperoleh secara bersamaan.

Pengakuan Aset Tetap: (1) Suatu perolehan aset tetap diakui dan dikelompokkan sebagai aset tetap jika memenuhi semua kriteria sebagai berikut : (a) memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam paragraf sebelumnya (b) memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (c) memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (d) nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi sesuai peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN). (2) Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. Selama proses pembangunan, biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat pada pos sementara Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah biaya konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap. (3) Suatu aset tetap yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset tetap jika memenuhi salah satu dari kriteria sewa pembiayaan sebagai berikut : (a) Pada akhir masa sewa, kepemilikan aset beralih kepada penyewa (*lessee*) (b) Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajarnya pada saat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. (c) Masa sewa mencakup sebagian besar (75% atau lebih) masa manfaat ekonomi aset tersebut meskipun hak milik tidak dialihkan. (d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aset, yaitu mencapai 90% atau lebih nilai wajar aset tersebut. (e) Aset sewa memiliki karakteristik khusus dimana hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa memerlukan modifikasi material. (4) Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada BLU ITS. (a) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). (b) Pengeluaran setelah perolehan yang tidak menimbulkan pertambahan masa manfaat, kapasitas, mutu atau standar kinerja harus diakui sebagai beban pemeliharaan. Misalnya BLU ITS melakukan pengecatan seluruh gedungnya dengan biaya Rp.100 juta. Pengeluaran tersebut harus dicatat sebagai beban pemeliharaan gedung karena pengecatan hanya untuk mempertahankan kondisi aset.

Pengukuran Aset Tetap: (1) Pengukuran pada saat pengakuan awal: Pada saat pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya hukum, biaya broker dan bea impor, setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang membuat aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dikehendaki. Biaya yang dapat diatribusikan meliputi biaya penyiapan lahan/tempat, biaya pengiriman, penyimpanan dan bongkar-muat, biaya pemasangan, biaya pengujian dan biaya profesional.

Perolehan dengan sewa pembiayaan, pembayaran cicilan atau penangguhan pembayaran : Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*), pembayaran cicilan, atau penangguhan pembayaran untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, maka biaya perolehan aset tersebut harus diukur sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran dimasa depan. Sedangkan bunga yang diperhitungkan harus diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sewa pembiayaan, cicilan atau penangguhan pembayaran. Perolehan dengan pertukaran: Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter, maka biaya perolehan aset tersebut diukur pada nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan, mana yang lebih andal. Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar aset yang diterima

atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan aset diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Jika biaya perolehan menggunakan nilai wajar, maka selisih yang terjadi antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset lama diakui sebagai keuntungan atau kerugian pertukaran. (2) Pengukuran setelah pengakuan awal: Setelah pengakuan awal, BLU ITS harus mengukur seluruh aset tetapnya pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Revaluasi aset tetap, jika dilakukan, harus mencakup seluruh unsur di dalam suatu kelompok aset tetap. Selisih yang timbul antara nilai revaluasi dan jumlah tercatat aset tetap diakui sebagai bagian dari ekuitas tidak terikat dengan nama Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap. Pada saat tertentu jumlah tercatat suatu aset tetap mungkin tidak lagi sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut dimasa depan, misalnya karena kerusakan fisik atau keusangan menyebabkan kinerjanya menurun. Jika ini terjadi, maka aset tersebut harus diturunkan nilainya sampai sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa, dan jumlah penurunan nilainya diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset tetap. Jumlah penurunan nilai diukur sebesar taksiran jumlah penurunan kinerjanya.

Jika suatu aset tetap dihentikan penggunaannya secara permanen, maka aset tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan direklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya sebesar nilai wajarnya. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan aktivitas periode berjalan. Jika nilai wajar aset tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka aset diukur pada nilai tercatatnya. BLU ITS tidak diperkenankan menghapuskan aset dan menjualnya kecuali telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Aset tetap yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk dijual atau dilelang harus dihentikan penggunaannya dan direklasifikasi ke kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya, yaitu taksiran harga jual yang wajar. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan aktivitas periode berjalan.

Penyusutan Aset Tetap. BLU ITS harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tetap tidak digunakan, kecuali jika aset tersebut dihentikan pengakuannya atau telah disusutkan secara penuh. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode dan tarip penyusutan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap. Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar dan dirinci berdasarkan jenisnya. Aset tetap yang dikuasai BLU ITS untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai disajikan tersendiri pada akun Properti Investasi. Hal-hal berikut mengenai aset tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan : (a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan aset tetap. (b) Rincian aset tetap yang dikelompokkan kedalam aset yang dimiliki dan aset sewa. (c) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode baik untuk aset tetap yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (aset sewa). (d) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lainnya seperti revaluasi dan reklasifikasi, baik untuk aset tetap yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (aset sewa). (e) Keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan aset tetap yang dijamin atas utang.

Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni Tahun Anggaran 2015 ini adalah merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan dan nilai mutasi yang terjadi selama 1 Januari s.d 30 Juni 2015. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN dan BLU selama periode berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN dan BLU periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi yaitu sistem informasi aset ITS (SIMAS ITS) sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas: (1) Neraca (2) Laporan Barang Persediaan (3) Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) (4) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (5) Laporan Aset Tak Berwujud (6) Laporan Barang Bersejarah (7) Laporan Penyusutan (8) Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang (9) Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (10) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAK-SIMAK pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (11) Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN (12) Arsip Data Komputer (ADK). Penyajian nilai BMN pos perkiraan Neraca pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 30 Juni 2015 dapat dilihat dalam table 1 berikut ini:

Tabel 1
Perkiraan Neraca Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 30 Juni 2015

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2.271.927.015	100%	0	0%	2.271.927.015	100%
	Sub Jumlah (1)	2.271.927.015	100%	0	0%	2.271.927.015	100%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	1.413.714.589.200	100%	0	0%	1.413.714.589.200	100%
2	Peralatan dan Mesin	470.101.130.650	98%	8.656.583.634	2%	478.757.714.284	100%
3	Gedung dan Bangunan	453.855.178.676	100%	21.259.810	0%	453.876.438.486	100%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.941.981.175	100%	0	0%	26.941.981.175	100%
5	Aset Tetap Lainnya	12.932.573.798	100%	39.848.080	0%	12.972.421.878	100%
6	KDP	215.714.366.332	100%	0	0%	215.714.366.332	100%
	Sub Jumlah (2)	2.593.259.819.831	99,66%	8.717.691.524	0,34%	2.601.977.511.355	100%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak k	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	10.250.747.236	100%	0	0%	10.250.747.236	100%
	Aset yang dihentikan dari						
3	penggunaan operasional Pemerintah	437.780.555	79%	118.551.417	21%	556.331.972	100%
	Sub Jumlah (3)	10.688.527.791	98,90%	118.551.417	1,10%	10.807.079.208	100%
	Total	2.606.220.274.637	99,66%	8.836.242.941	0,34%	2.615.056.517.578	

Sumber: Tata Usaha ITS

Nilai BMN Laporan Barang Kuasa Pengguna 30 Juni 2015 Rp 2.606.220.274.637 disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu; Persediaan, Tanah, Peralatan dan

Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 30 Juni 2015 per perkiraan Neraca adalah seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Akumulasi Penyusutan BMN

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	337.442.273.543	98%	8.323.474.621	2%	345.765.748.164	100%
3	Gedung dan Bangunan	61.479.734.671	100%	2.251.853	0%	61.481.986.524	100%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.480.928.323	100%	0	0%	16.480.928.323	100%
5	Aset Tetap Lainnya	367.572.059	100%	580.000	0%	368.152.059	100%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
	Sub Jumlah (1)	415.770.508.596	98,04%	8.326.306.474	1,96%	424.096.815.070	100%
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	0	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	418.823.149	78%	118.551.417	22%	537.374.566	100%
	Sub Jumlah (2)	418.823.149	77,94%	118.551.417	22,06%	537.374.566	100%
	Total	416.189.331.745	98,01%	8.444.857.891	1,99%	424.634.189.636	

Sumber: Tata Usaha ITS

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 30 Juni 2015 per akun neraca adalah seperti yang tersaji dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Perbandingan Nilai BMN

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Persediaan	2.271.927.015	2.271.927.015	-
2	Tanah	1.413.714.589.200	1.413.714.589.200	-
3	Peralatan dan Mesin	470.101.130.650	470.101.130.650	-
4	Gedung dan Bangunan	453.855.178.676	453.855.178.676	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.941.981.175	26.941.981.175	-
6	Aset Tetap Lainnya	12.932.573.798	12.932.573.798	-
7	KDP	215.714.366.332	215.714.366.332	-
8	Aset Tak Berwujud	10.250.747.236	10.250.747.236	-
9	Aset Lain-lain*)	437.780.555	437.780.555	-
	Total	2.606.220.274.637	2.606.220.274.637	-

Sumber: Tata Usaha ITS

Dalam tabel 3 tersebut diatas dapat diketahui bahwa laporan Barang dan Laporan Keuangan nilainya sama sehingga tidak ada selisihnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Pada Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember penyusunan dan pelaporan barang milik negara telah menggunakan sistem aplikasi yang dibuat oleh ITS yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) ITS. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) ITS ini berupa suatu aplikasi yang dapat melakukan pengelolaan data dan informasi terkait aset fisik yang dimiliki khususnya dalam belanja modal. SIMAS ITS sudah terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan, Aplikasi Pengesahan dan Aplikasi SimakBMN (2) Dalam mekanisme penyusunan dan penyajian laporan barang milik negara BLU ITS sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan menerapkan sepenuhnya Pedoman Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (3) Adanya Keterbatasan dalam aplikasi SIMAS ITS yaitu diperlukan instalasi di PC dengan OS Windows untuk menjalankannya dan setiap ada update harus dilakukan proses instalasi manual.

Saran

Sistem Aplikasi Manajemen Aset (SIMAS) ITS yang telah diterapkan di Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember agar dapat dikembangkan mengikuti setiap perubahan yang baik berdasarkan dengan peraturan- peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, G.H. dan W.S. Hopwood. 2004. *Accounting Information System*. Prentice Hall. London. Terjemahan J.A. Saputra. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi. Yogyakarta.
- Bungin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Media Group. Jakarta
- Direktur Jendral Kekayaan Negara, Peraturan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN.
- Maman, K.H. 2002. *Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dengan Kualitatif*. IPB. Bogor.
- McLeod, Jr.R dan G. Schell. 2001. *Management Information Sytem*. Prentice Hall. New Jersey. Terjemahan H. Teguh. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. PT.Indeks. Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Menteri Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Menteri Keuangan. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Menteri Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuiditas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Nrgara/Lembaga.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, E. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. CV.AndiOffset .Yogyakarta
- O'Brien, JA dan G.M. Marakas. 2014. *Management Information System*. Mc.Graw-Hill education. New York. Terjemahan L.N. Puspitasari dan H. Kurnia. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Republik Indonesia. 2011. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2012.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Winarno, W.W. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. UPP (Unit Penerbit dan Percetakan) AMP YKPN. Yogyakarta.